

LAKIP

TAHUN 2018



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PERHUBUNGAN
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan pertolonganNYA sehingga LAKIP Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu Tahun 2018 dapat disusun tepat pada waktunya.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu melaporkan capaian kinerja dari setiap sasaran strategis dan menyampaikan kepada Walikota Kota Kotamobagu sebagai bahan Pertanggungjawaban dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja.

Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun, disadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusun LAKIP ditahun mendatang.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu Tahun 2018.

Akhirnya semoga LAKIP ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).

Kepala Dinas



NASLI PAPUTUNGAN, SE

Pembina

NIP. 19730610 199402 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kinerja tahun 2018 yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja tahun 2018 pada hakekatnya merupakan kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018. Dalam rangka merealisasikan good governance, Dinas Perhubungan berusaha untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2014-2018. Visi dan Misi yang ada merupakan suatu tantangan yang harus dicapai lewat program dan kegiatan yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2014-2018. Rencana kerja pemerintah, kontrak kinerja, serta Rencana Strategis harus dilaksanakan secara konsisten selama 5 tahun kedepan. Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan sasaran dan indikator kinerja yang diharapkan dan diimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsi SKPD. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja dari Dinas Perhubungan yang hendak dicapai pada tahun 2018 adalah:

SASARAN		Target
URAIAN	INDIKATOR	
1	2	3
MENINGKATNYA KESELAMATAN BERLALULINTAS	PERSENTASE MENURUNNYA ANGKA KECELAKAAN	80%
MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PERHUBUNGAN	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	100%

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja terhadap sasaran-sasaran strategis yang ada menunjukkan bahwa terhadap 2 sasaran strategis dan 2 indikator kinerja yang hendak dilaksanakan, Dinas Perhubungan **Berhasil** melampaui target yang ditetapkan. *(Dapat dilihat pada Bab III)*

Dengan capaian tersebut terlihat bahwa Dinas Perhubungan terus berusaha untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi yang sudah ditetapkan, walaupun masih terdapat banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mencapai sasaran tersebut.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. GAMBARAN UMUM SKPD.....	1
1.1.1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN ORGANISASI.....	1
1.1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
1.2. SUMBER DAYA SKPD.....	13
1.3. KINERJA PELAYANAN SKPD.....	15
1.4. PERUMUSAN ISU-ISU STRATEGIS.....	15
1.5. ANALISIS PELUANG,ANCAMAN,TANTANGAN DAN KELEMAHAN.....	17
BAB II. PERENCANAAN KERJA.....	19
2.1 RENCANA STRATEGI.....	19
2.1.1 VISI DAN MISI.....	19
2.1.2 TUJUAN, SASARAN,STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1 METODE PENGUKURAN	26
3.2 CAPAIAN KINERJA.....	27
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	33
BAB IV. PENUTUP.....	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

1.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Tipe B, maka Dinas Perhubungan mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Sekretariat yang terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
 - b. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - c. Seksi Perparkiran
3. Bidang Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Transportasi.
 - b. Seksi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c. Seksi Pengelola Perlengkapan Jalan.
4. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Operasional, yang terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Kajian dan Analisis Lalu Lintas.
 - b. Seksi Operasional dan Ketertiban
 - c. Seksi Bina Usaha Angkutan.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan. Perumusan kebijakan teknis, pengelola unit pelaksana teknis daerah, pengelola urusan ketatausahaan, pembinaan teknis operasional, pembinaan staf, pemberian pelayanan umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota.

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perhubungan.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang perhubungan;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan;
 - f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinergitas dan integritas pelayanan administrasi;
- b. penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;
- c. pelayanan urusan ketatausahaan dan keuangan;
- d. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan program dan peraporan;
- f. penyelenggaraan urusan umum dan rumah tangga;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan peralatan keperluan teknis dan administrasi;
- d. menata dan memelihara sarana dan prasarana;
- e. menyiapkan bahan dan data kepegawaian;
- f. melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian ;
- g. mengelola dan melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan;

- h. melaksanakan urusan administrasi, pembinaan dan pengawasan kepegawaian;
- i. mengelola dan melaksanakan urusan keprotokolan dan perjalanan dinas;
- j. melaksanakan dan mengawasi urusan rumah tangga;
- k. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris/aset kantor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- l. melakukan proses administrasi terkait dengan penatausahaan, tata laksana dan pengelolaan kesekretariatan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub bidang dalam unit kerja, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program dan kegiatan, serta melaksanakan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - b. mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program kerja Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - c. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing unit kerja;

- d. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- e. mengkoordinasikan, menyusun dan menganalisis rumusan rencana belanja, anggaran/keuangan;
- f. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan/Anggaran;
- g. menyiapkan, menyusun dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan/anggaran;
- h. menyiapkan dan melaksanakan bahan/data, sistematika, prosedur dan mekanisme manajemen akuntansi pelaporan;
- i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melakukan urusan lalu lintas dan angkutan jalan.
- {2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana kerja, kebijakan umum dan teknis operasional bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta perparkiran;
 - b. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan perparkiran;

- c. pelaksanaan penetapan klasifikasi jaringan jalan, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- d. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan serta perparkiran;
- e. pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang lalu lintas dan perparkiran; dan
- f. pelaksanaan. tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugasnya

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

- (1) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kelancaran, keamanan, keselamatan lalu lintas dan pemakai jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Manajemen Rekayasa LaIu Lintas menyelenggarakan fungsi:
 - a. menelaah data/ informasi sebagai bahan penyusunan, perumusan, kebijakan umum dan teknis rencana kerja;
 - b. melaksanakan, perencanaan, kelancaran, keamanan, keselamatan lalu lintas dan pemakai jalan;
 - c. memberikan saran/masukan dalam penentuan izin pembangunan fasilitas parkir;
 - d. menyiapkan data/informasi sebagai bahan penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - e. mengendalikan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi manajemen rekayasa dan lalu lintas;
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

- (1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan untuk mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan, serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut uji kendaraan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun program kerja dan rencana anggaran;
 - b. menginventarisir kendaraan dan perbengkelan;
 - c. mengelola pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
 - d. menyusun petunjuk teknis dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian kendaraan bermotor uji;
 - f. melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
 - g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Angkutan dan Perparkiran

- (1) Seksi Angkutan dan Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam melakukan urusan pengelolaan angkutan jalan perparkiran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan dan Perparkiran menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun program kerja dan rencana anggaran;
 - b. melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penelaahan data / informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional angkutan jalan dan perparkiran;

- c. melakukan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan angkutan jalan dan parkir serta tertib administrasi, pelaporan berkala dan tahunan;
- d. melakukan penetapan standar batas maksimum muatan angkutan serta bongkar muat angkutan;
- e. melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan parkir ;
- f. memberikan pelayanan teknis dibidang parkir;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Bidang Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (1) Bidang Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melaksanakan tugas persiapan perencanaan sarana prasarana serta penyusunan urusan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:
 - a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja;
 - b. menyiapkan rencana program kegiatan dalam rangka pelaksanaan survei, perencanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan fisik seluruh sarana prasarana perhubungan dan lalu lintas jalan;
 - c. melaksanakan rencana program kegiatan dan petunjuk teknis dibidang sarana dan prasarana lalu lintas angkutan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana dan prasarana;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana prasarana;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Transportasi

- (1) Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Transportasi melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan serta bimbingan keselamatan lalu lintas dan transportasi.
- {2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Transportasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. menyusun bahan rencana dan program kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas bimbingan dan keselamatan lalu lintas dan transportasi;
 - c. melakukan bimbingan keselamatan lalu lintas dan transportasi;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat keselamatan lalu lintas;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang bimbingan dan keselamatan lalu lintas;
 - f. melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan penertiban lalu lintas yang di melaksanakan oleh dinas perhubungan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (1) Seksi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. mengumpulkan dan melakukan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusun rencana kerja;

- c. melakukan penyusunan, pengumpulan, pengelolaan dan penelaahan data/ informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis perencanaan sarana dan prasarana jaringan lalu lintas jalan;
- d. melaksanakan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota;
- e. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Pengelolaan Perlengkapan Jalan

- (1) Seksi Pengelolaan Perlengkapan Jalan, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang pengelolaan perlengkapan jalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Perlengkapan Jalan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pelengkap dan perlengkapan jalan;
 - c. melaksanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung jaringan jalan kota;
 - d. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala bidang sarana prasarana dan lalu lintas angkutan jalan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Operasional

- (1) Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Operasional, melaksanakan tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian operasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian, Pengawasaa dan Operasional, menyelenggarakan fungsi :
 - a. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja;
 - b. melakukan pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan teknis kendaraan bermotor di jalan dan terminal;
 - c. melakukan pemerintah perizinan angkutan orang dan barang di jalan dan terminal;
 - d. melaksanakan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan keselamatan terhadap kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor;
 - f. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, penyuluhan tentang ketertiban dan keselamatan lalu lintas;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang pengendalian pengawasan dan operasional; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Kajian dan Analisis Lalu Lintas

- (1) Seksi Kajian dan Analisis Lalu Lintas, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan analisis lalu lintas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kajian dan Analisis Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;

- b. menyusun bahan rencana dan program kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas kajian dan analisis lalu lintas;
- c. melakukan pengumpulan data serta melakukan analisis terhadap jaringan jalan;
- d. melakukan kajian analisis dalam rangka pembangunan, pengembangan kawasan permukiman, pusat perbelanjaan, hotel rumah sakit, universitas/ sekolah, kawasan industri, terminal, stadion dan tempat ibadah;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Operasional dan Ketertiban

- (1) Seksi Operasional dan Ketertiban, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana operasional dan ketertiban.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pengendalian operasional lalu lintas, angkutan jalan dan terminal;
 - c. melakukan kegiatan pemantauan, pengendalian, pengawasan dan penertiban operasional lalu lintas, angkutan dan terminal;
 - d. melakukan koordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan jalan dengan instansi lain yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran parkir melalui operasional mobil derek;
 - f. melakukan penyidikan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan (LLAJ);
 - g. melakukan penyidikan terhadap kendaraan bermotor yang tidak/belum memiliki atau habis masa berlaku uji berkala kendaraan bermotor;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinal sesuai bidang tugas dan fungsi.

Seksi Bina Usaha Angkutan

- (1) Seksi Bina Usaha Angkutan, melaksanakan tugas pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan dalam bidang usaha angkutan.
- (2) Dalam melalsanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha Angkutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyiapkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan program;
 - b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bina usaha angkutan dan terminal;
 - c. melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan terminal;
 - d. melaksanakan tertib administrasi serta melakukan pelaporan berkala dan tahunan;
 - e. menyiapkan, mengolah dan menganalisa data perizinan usaha bidang angkutan dalam rangka pengelolaan, pembinaan, pengembangan usaha angkutan;
 - f. melakukan evaluasi serta pendataan terhadap pencapaian program dan pemberian perizinan di bidang usaha angkutan;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

1.2. Sumber Daya SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu didukung oleh ketersediaan personil dengan komposisi sebagai berikut :

- PNS Pejabat Struktural : 16 Orang
- PNS Fungsional Umum/Staf : 14 Orang
- Tenaga Kontrak : 69 Orang

Tabel 1. Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<i>NO</i>	<i>PENDIDIKAN</i>	<i>JUMLAH (Org)</i>
1	Strata 3 (S-3)	-
2	Strata 2 (S-2)	1
3	Strata 1 (S-1)	19
4	Sarjana Muda/D3	5
5	SLTA/SMK	6

Tabel 2. Komposisi PNS berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH (Org)
1	Diklat PIM II	-
2	Diklat PIM III	1
3	Diklat PIM IV	1

Tabel 3. Komposisi PNS Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Org)
1	IV	2
2	III	23
3	II	5
4	I	-

1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Untuk kinerja pelayanan/capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu berdasarkan sasaran/target, menurut indikator kinerja kunci SKPD, indikator lainnya, dapat dilihat pada lampiran/tabel pengukuran.

1.4. Perumusan Isu-Isu Strategis

Dengan mengkaji situasi dan kondisi baik internal maupun eksternal organisasi, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan, antara lain :

1.4.1 Permasalahan Internal dan Eksternal

I. Permasalahan Internal

- ✓ Minimnya profesional aparaturnya di Bidang IT dalam menunjang Kinerja Program dan keuangan;
- ✓ Terbatasnya sarana dan prasarana kerja yang mendukung;
- ✓ Kurangnya dana dalam pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
- ✓ Kurangnya komitmen dalam menjalankan tugas;
- ✓ Rendahnya kapasitas SDM bidang Transportasi;
- ✓ Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Kotamobagu seperti marka, rambu RPPJ, delineator dan paku jalan;
- ✓ Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh;
- ✓ Kurangnya anggaran dalam menopang Program dan Kegiatan;
- ✓ Rendahnya kapasitas SDM dalam perencanaan sarana dan prasarana Perhubungan;
- ✓ Kurangnya koordinasi dan komitmen dalam menjalankan tupoksi bidang serta koordinasi antar bidang.

II.Pemasalan Eksternal

- ✓ Pencemaran lingkungan kendaraan bermotor (motorized traffic) seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor;
- ✓ Kecelakaan lalu lintas;
- ✓ Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum;
- ✓ Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan;
- ✓ Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi;
- ✓ Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum yang berkapasitas besar;
- ✓ Masih minimnya minat swasta untuk berperan dalam investasi pembangunan jalan;
- ✓ Pemilihan moda becak motor (bentor) mempunyai persentase terbesar;
- ✓ Belum mantapnya manajemen perusahaan angkutan kota.

1.5. Analisis Peluang, Ancaman/Tantangan, Kekuatan dan Kelemahan (SWOT)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan tentu saja memiliki faktor-faktor pendukung serta penghambat yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis SKPD. Faktor-faktor dimaksud antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peluang

- a. Letak Geografis Kota Kotamobagu merupakan pusat perekonomian dalam transaksi perdagangan barang dan jasa se- Bolaang Mongondow Raya;
- b. Adanya Visi dan Misi Dinas Perhubungan
- c. Adanya Komitmen Pimpinan.
- d. Misi Pemerintah daerah dalam pemerataan Infrastruktur, baik di dalamnya Prasarana Perhubungan.

2. Ancaman/ Tantangan

- a. Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu-lintas terutama penyediaan lahan parkir dengan masih tingginya parkir yang menggunakan badan jalan.
- c. Pemilihan moda becak motor (bentor) mempunyai persentase terbesar;
- d. Pusat Aktivitas perekonomian yang belum merata

3. Kekuatan

- a. Adanya payung hukum sebagai landasan operasional penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan SKPD.

- b. Bahwa dinamika kebebasan demokrasi dan aspirasi sebagai perubahan iklim sosial, politik dan budaya masyarakat serta perubahan peta politik nasional yang terjadi pada saat ini menjadikan pemicu peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju pelayanan publik yang prima ("*Good Government* dan *Clean Governance*").
- c. Wilayah Kota Kotamobagu sebagai pusat perekonomian dalam transaksi perdagangan barang dan jasa dari berbagai produk dengan dukungan infrastruktur perhubungan.
- d. Adanya masukan dan kritikan dari masyarakat yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat

4. Kelemahan

- a. Belum tersedia dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- b. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung serta infrastruktur perhubungan;
- c. Masih kurangnya kapasitas SDM teknis dalam bidang Perhubungan;
- d. Terbatasnya Anggaran SKPD.

BAB II PERENCANAAN KERJA

2.1. Rencana Strategi

2.1.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan

Visi Dinas Perhubungan dirumuskan dengan memperhatikan visi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu terpilih kurun waktu tahun 2014- 2018 yaitu :

"TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DI KAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING".

Berdasarkan pada visi Kota Kotamobagu diatas, visi Dinas Perhubungan :

A. Visi :

"Terwujudnya Sistem Transportasi yang aman, Nyaman, Tertib, Berkeselamatan dan Terintegrasi".

B. Misi :

1. Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi ketatausahaan yang efektif dan efisien berbasis Managemen Information System dalam rangka "Clean Government" dan "Good Governance";
2. Mewujudkan peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas Perhubungan serta Kesekretariatan
3. Mewujudkan sistim transportasi yang aman, nyaman dan tertib berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM);

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2014-2018, dirumuskan berdasarkan Misi Dinas Perhubungan, antara lain :

A. Tujuan :

1. Terwujudnya Sarana Angkutan yang Aman.
2. Menurunnya Angka Kecelakaan dan Titik Kemacetan.
3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kierja Birokrasi.

B. Sasaran

1. Terwujudnya Sarana Angkutan yang Aman.
2. Menurunnya Angka Kecelakaan dan Titik Kemacetan.
3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kierja Birokrasi.

C. Strategi

1. Peningkatan belanja operasional Dinas Perhubungan;
2. Peningkatan belanja modal dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
3. Peningkatan Kapasitas SDM;
4. Peningkatan hubungan stakeholder Organisasi;
5. Peningkatan kajian perencanaan berbasis database;

D. Arah Kebijakan

1. Penyediaan sistem pengolahan administrasi ketatausahaan yang efektif dan efisien berbasis Management Information System dalam rangka "Good Government" dan "Clean Governance";
2. Penyediaan fasilitas transportasi darat untuk menunjang pembangunan, kemandirian dan ramah lingkungan;

3. Penyediaan pelayanan tertib administrasi perizinan dan pengujian kendaraan;
4. Penyediaan Peraturan Daerah yang mengatur pengendalian lalu lintas dan angkutan darat.

Rumusan Sasaran Strategi arah kebijakan diatas selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2014-2018 pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Rencana Strategis 2014-2018 Dinas Perhubungan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	Formula	TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)				
						2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya sarana angkutan yang aman	Persentase angkutan yang laik jalan	90%	Terwujudnya sarana angkutan yang aman	Persentase angkutan yang laik jalan	Jumlah kendaraan angkutan yang melakukan uji pada tahun n dibagi jumlah kendaraan angkutan wajib uji di kali 100%	90%	90%	90%	90%	90%
Menurunkan angka kecelakaan dan titik kemacetan	Persentase titik kemacetan yang teratasi	100%	Menurunkan angka kecelakaan dan titik kemacetan	Persentase titik kemacetan yang teratasi	Jumlah titik rawan kemacetan yang teratasi di tahun n dibagi jumlah titik rawan kemacetan dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pemasangan rambu-rambu	25%		Persentase pemasangan rambu-rambu	Jumlah rambu-rambu LL terpasang dibagi Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikali 100%				25%	50%
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	90%	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti /Jumlah temuan dikali 100%				90%	95%

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2014-2018 diatas,
Indikator kinerja Utama Perubahan Tahun 2018 tertuang dalam table berikut :

Tabel 2.2

IDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN TAHUN 2018

SASARAN	INDIKATOR	Formula
1	2	3
Meningkatnya keselamatan berlalulintas	Persentase menurunnya angka kecelakaan	$\frac{\text{Jumlah kecelakaan thn } n - \text{jumlah kecelakaan thn } n - 1}{\text{jumlah kecelakaan tahun } n} \times 100$
Meningkatnya pendapatan asli daerah sektor perhubungan	Persentase peningkatan jumlah pendapatan asli daerah	$\frac{\text{Realisasi pendapatan asli daerah}}{\text{target pendapatan asli daerah}} \times 100$

Tabel 2.3

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

SASARAN	INDIKATOR	Target
1	2	3
Meningkatnya keselamatan berlalulintas	Persentase menurunnya angka kecelakaan	80%
Meningkatnya pendapatan asli daerah sektor perhubungan	Persentase peningkatan jumlah pendapatan asli daerah	100%

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Perhubungan

NO	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Satuan	Anggaran Rp
1	2	3	5	6
1	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Meningkatnya marka jalan	%	1,275,775,000
		Meningkatnya rambu lalu lintas	%	
		Meningkatnya fasilitas jalan	Unit	
	Kegiatan pembangunan sarana prasarana dan fasilitas perparkiran	Tersedianya marka jalan	Meter	136,875,000
		Tersedianya rambu lalu lintas	Unit	52,500,000
		Tersedianya fasilitas jalan	Unit	33,675,000
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perparkiran	Set	1.052.725.000
2	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Meningkatnya rambu lalu lintas	%	416,500,000
	Kegiatan pengadaan traffic light	Tersedianya rambu lalu lintas	Unit	416,500,000
3	Program peningkatan pelayanan angkutan	Meningkatnya pengawasan lalulintas	%	900,732,800
		Meningkatnya kendaraan laik jalan	%	
	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Terselenggaranya pengawasan lallintas	Titik	72,800,000
	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan		Dokumen	376.481.400
	Forum Lalu Lintas		Kegiatan	400.951.400
	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	Terselenggaranya kir kendaraan	Kendaraan	52,500,000
4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatnya Fasilitas Penunjang BRT	%	1.455.500.000
	Kegiatan Pembangunan Shelter BRT	Tersedianya Shelter BRT	Unit	1.455.500.000

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018 Dinas Perhubungan

SASARAN	INDIKATOR	Target
1	2	3
Meningkatnya keselamatan berlalulintas	Persentase menurunnya angka kecelakaan	80%
Meningkatnya pendapatan asli daerah sektor perhubungan	Persentase peningkatan jumlah pendapatan asli daerah	100%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	416.500.000,00	
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	902.732.800,00	
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1.455.500.000,00	
Program Pembanunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.275.775.000,00	

Dalam rangka pencapaian indikator sasaran berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2018 Dinas Perhubungan, sebagaimana Tabel 2.5 diatas, maka pada APBD Tahun 2018 telah ditetapkan Program berdasarkan sasaran strategis Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Program/Kegiatan berdasarkan sasaran strategis Tahun 2018

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	416.500.000,00	
2.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	902.732.800,00	
3.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1.455.500.000,00	
4.	Program Pembanunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.275.775.000,00	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Capaian indikator kinerja yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu merupakan ukuran atas hasil (kinerja) organisasi dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam periode tahun anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan Kegiatan yang diamanatkan dalam urusan Perhubungan.

Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan (goal) serta visi/misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut.

3.1 Metode Pengukuran Kinerja

Penghitungan persentase pencapaian capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{c} \% \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \% \text{Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Rencana-(Realisasi- Rencana)}}{\text{Rencana}} \times \frac{100}{\%}$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut:

SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
>100	Sangat Baik
80 – 100	Baik
> 55 – 80	Sedang
< 55	Kurang

3.2 Capaian Kinerja Tahun 2018

Capaian kinerja dapat dilihat pada pencapaian sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Adapun pencapaian sasaran dapat dinilai melalui Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.

Selain itu, pengukuran kinerja mencakup pula beberapa capaian kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, benchmarking dan perbandingan kinerja aktual dengan standarnya atau standar pelayanan minimal (SPM) serta perbandingan kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan rencana jangka menengah.

Pencapaian sasaran 1 Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas

Tabel 3.1

Sasaran Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja 2017	Tahun 2018		Capaian kinerja 2018
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Prosentase menurunnya angka kecelakaan	persen	-	-	-	80	57,14	71,43

Pencapaian Sasaran 1, Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas sebagaimana pada table diatas, ini hanya dapat diukur pada tahun 2018 karena pada tahun 2017 sasaran ini belum ada rilis. Fomulasi pengukuran yang digunakan adalah angka kecelakaan pada tahun n dikurangi angka kecelakaan pada tahun n-1 dibagi angka kecelakaan pada tahun n dikali 100%. Sehingga dari data yang ada diketahui bahwa pada tahun 2017 terjadi 198 kasus kecelakaan lalu lintas sedangkan pada tahun 2018 telah terjadi 126 Kasus kecelakaan lalu lintas (terjadi penurunan sebanyak 72 kasus).

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 dari target yang direncanakan menurunnya sebesar 80% tidak dapat terealisasi. Dimana dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 80 %, dengan realisasi 57,14 % maka capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar **71,43%** dan bernilai **sedang**.

Tabel 3.2

Data Kecelakaan Di Wilayah Kota Kotamobagu Tahun 2018

NO	Bulan	Jumlah Korban	
		Thn 2017	Thn 2018
1	Januari	15	7
2	Februari	20	7
3	Maret	28	7
4	April	27	9
5	Mei	25	7
6	Juni	19	8
7	Juli	9	8
8	Agustus	8	10
9	September	12	7
10	Oktober	18	8
11	November	11	11
12	Desember	6	37
	Jumlah	198	126

Sasaran Meningkatnya Keselamatan Ber Lalu Lintas dengan Indikator menurunnya angka kecelakaan ini didukung oleh 4 Program dan 7 Kegiatan :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan,
 - Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas,
 - Kegiatan Pengadaan Traffic Light
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan,
 - Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya,
 - Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan

- Forum Lalu Lintas
 - Kegiatan Uji Kelaikan Sarana Transportasi guna Keselamatan Penumpang
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- Kegiatan Pembangunan Shelter BRT

Adapun permasalahan yang dihadapi :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat selaku pengguna jalan akan pentingnya tertib dan disiplin dalam berlalu lintas, sehingga sering mengabaikan keselamatan sendiri maupun orang lain seperti mengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk serta sambil menggunakan HP dan ugal-ugalan di jalan.
2. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan dalam hal perawatan kendaraan sehingga kurang memenuhi persyaratan Laik jalan.
3. Minimnya Fasilitas Keselamatan lalu lintas yang terpasang (rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan dan Traffic Light)

Upaya yang ditempu dalam meningkatkan capaian indikator ini :

1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan Jalan bersama instansi terkait.
2. Pengadaan/pemasangan Fasilitas Keselamatan lalu lintas sesuai kebutuhan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparat Dinas Perhubungan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengaturan lalu lintas di jalan.

Realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 71,43 % dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar 100% maka capaian kinerja terhadap tahun akhir sebesar 71,43%

Pencapaian sasaran 2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan

Tabel 3.3

Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja 2016	Tahun 2018		Capaian kinerja 2018
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Presentase meningkatnya pendapatan asli Daerah	persen	-	-	-	100%	93,17%	93,17%

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan dilakukan dengan Indikator Presentase meningkatnya pendapatan asli Daerah. Sesuai realisasi capaian pendapatan asli Daerah tahun 2018 Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu sebesar 93,17%, sehingga dari target yang ditetapkan sebesar 100% maka tingkat capaian kinerja tahun 2018 sebesar 93,17% dan bernilai **baik**.

Tabel 3.4

Hasil Capaian Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan Tahun 2018

NO	BULAN	Retribusi Tempat Khusus Parkir (Rp)	Retribusi Pengujian Bermotor (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Januari	130.917.700	10.178.000	141.095.700
2	Februari	113.210.200	8.428.000	121.638.200
3	Maret	121.901.800	10.018.500	131.920.300
4	April	120.570.500	8.044.500	128.615.000

5	Mei	127.794.400	12.887.500	140.591.900
6	Juni	97.437.400	5.445.000	102.882.400
7	Juli	132.812.700	15.832.000	148.644.700
8	Agustus	127.879.500	14.029.000	141.908.500
9	September	103.570.700	12.683.000	116.253.700
10	Oktober	168.680.800	18.183.500	186.864.300
11	November	169.241.400	20.707.500	189.948.900
12	Desember	140.875.900	15.621.500	156.497.400
Jumlah yang terealisasi		1.554.803.000	152.058.000	1.706.861.000
Pagu/Target		1.680.000.000	152.000.000	1.832.000.000
Prosentase		92,55 %	100,04 %	93,17 %

Belum tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sector Perhubungan berbanding dengan target PAD yang telah ditetapkan pada Tahun 2018 khususnya Retribusi Khusus Tempat Parkir dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pada proses penetapan besaran PAD tahun 2018 yang dilaksanakan pada medio Oktober 2017 sudah memperhitungkan Tarif perjenis satuan kendaraan yang menjadi obyek retribusi tempat khusus parkir berdasarkan Ranperda perubahan PERDA Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus yang sudah dimasukkan pada badan legislasi/Bapemperda DPRD Kota Kotamobagu, namun kenyataannya pada tahun 2018 belum bisa digunakan karena Ranperda sebagaimana dimaksud belum ditetapkan.
- b) Parkir Portal/Elektroni di RSUD Kota Kotamobagu yang selesai diadadakan pada bulan Juni 2018 kemudian dilakukan beberapa kali uji coba terkait kesiapan tenaga/petugas pemungut retribusi serta keadaan alat/perangkat. Operasional Parkir secara elektronik yang ada di RSUD Kota Kotambagu baru dilaksanakan(beroperasi) pada tanggal 25 Oktober 2018, dengan kata lain bahwa penambahan lokasi pelataran parkir baru dilaksanakan pemungutan retribusi parkir secara elektronik pada tanggal 25 Oktober 2018.

- c) Untuk Pendapatan pada sektor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk tahun 2018 capaian penerimaannya melebihi target.

Adapun upaya yang ditempu dalam pencapaian Indikator Sasaran ini yaitu :

1. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian terhadap menyelenggaraan pemungutan Retribusi tempat khusus parkir;
2. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Adapun materi yang dilakukan perubahan adalah pasal yang mengatur tentang Tarif Retribusi, akan tetapi Perda ini belum diberlakukan pada tahun 2018;
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perparkiran yang memadai, teratur dan aman;
4. Pemanfaatan potensi kawasan/lahan parkir yang dapat dimungkinkan menjadi area perparkiran.

Realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 93,17 % dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD sebesar 100% maka capaian kinerja terhadap tahun akhir sebesar 93,17%

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung pada Dinas Perhubungan dialokasikan sebesar Rp. 2,635,690,050 hingga 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 2,605,934,723 atau sebesar 98,87 %. Belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja gaji dan tunjangan dengan alokasi sebesar Rp. 1,753,156,276 terealisasi Rp. 1,742,570,991 atau sebesar 99,40 %; dan Belanja tambahan penghasilan PNS Rp. 882,533,774 dengan realisasi Rp. 863,363,732 atau 97,83%.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung pada Dinas Perhubungan dialokasikan sebesar Rp. 6,806,037,930 realisasi sebesar Rp. 5,932,818,866 atau 87,17%. Rincian alokasi dan realisasi belanja langsung dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Tahun 2018

No.	PROGRAM	ALOKASI (Rp)	REALISASI ANGGARAN	
			JUMLAH (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.649,985,375	1,422,784,261	86.23
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	760,544,755	710,158,103	93.37
3.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1,275,775,000	712,690,000	55.86
4.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	345,000,000	342,441,000	99.26
5.	Program Peningkatan pelayanan angkutan	902,732,800	891,640,002	98,77
6.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1,455,500,000	1,442,745,000	99,12
7.	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	416,500,000	410,360,500	98.53

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya bidang perhubungan, juga sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan berikutnya.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja diatas 82,30 % dari 2 indikator kinerja utama (IKU).

Capaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada table berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	MENINGKATNYA KESELAMATAN BERLALULINTAS	PERSENTASE MENURUNNYA ANGKA KECELAKAAN	%	80	57,14	71,43
2.	MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PERHUBUNGAN	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	%	100	93,17%	93,17%

Banyak hal membanggakan yang berhasil dicapai Dinas Perhubungan, akan tetapi masih banyak pula permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan.

Adapun beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan yaitu:

1. Permasalahan yang semakin kompleks di daerah mengakibatkan tidak sinkronnya Rencana Strategis yang tertuang dalam RPJMD dan program kegiatan SKPD;

2. Sumber daya manusia yang jauh dari harapan secara jumlah dan secara kualitas;
3. Sarana dan Prasara Kantor yang belum memadai / representatif, diantaranya gedung kantor yang ada sudah kurang layak untuk bekerja;
4. Kurangnya alokasi anggaran dalam program dan kegiatan yang menunjang visi dan misi;

Adapun rekomendasi yang bias dijadikan sebagai masukan adalah:

1. Mempertegas dan mensinergikan program serta kegiatan yang menunjang untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan yang tertuang pada Rencana Strategi (Renstra) 2014-2018.
2. Melaksanakan rekrutmen sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan daerah serta peningkatan kapasitas SDM yang sudah ada.
3. Menambah serta memprioritaskan anggaran SKPD yang berbasis kinerja dan menunjang visi dan misi.
4. Meningkatkan animo masyarakat dalam rangka mendukung peningkatan ketertiban lalu lintas dengan peningkatan alokasi anggaran serta menciptakan kegiatan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Sangat disadari bahwa berbagai kemajuan dan keberhasilan yang dicapai pada tahun 2018 tidak terlepas dari dukungan dan topangan yang diberikan oleh seluruh komponen masyarakat Kota Kotamobagu.

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu tahun 2018 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN

**TABEL TARGET DAN REALISASI KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2018**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MENINGKATNYA KESELAMATAN BERLALULINTAS	PERSENTASE MENURUNNYA ANGKA KECELAKAAN	80%	57,14	71,43
2.	MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PERHUBUNGAN	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	100%	93,17%	93,17%

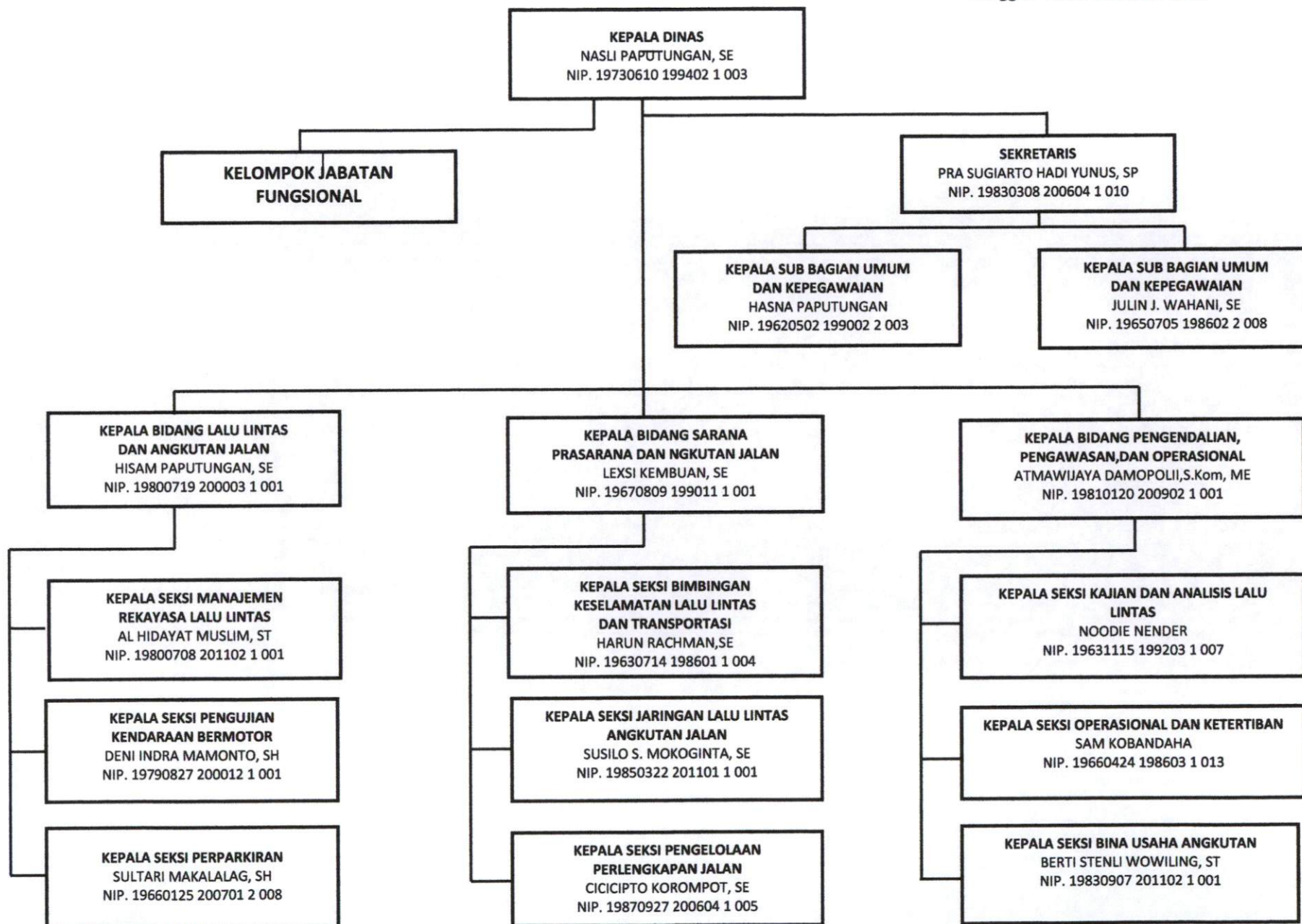
NO	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	416.500.000,00	
2.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	902.732.800,00	
3.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1.455.500.000,00	
4.	Program Pembanunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.275.775.000,00	

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA KOTAMOBAGU

Lampiran : Peraturan Walikota Kotamobagu

Nomor : 45 Tahun 2016

Tanggal : 28 November 2016



Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tahun 2014-2018

Visi Renstra : Terwujudnya Sistem Transportasi yang Aman, Nyaman, Tertib, Berkeselamatan, dan Terintegrasi

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
								2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Persentase temuan BPK/Inspektoral yang ditindaklanjuti											90		95						
				1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	75	90	426,981,970	90	772,846,275	90	881,631,325	90	1,132,992,696	90	863,995,273			4,078,447,539		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermeterai (Lembar)		650	3,150,000	650	3,150,000	650	3,150,000	650	3,150,000	650	3,150,000			15,750,000		
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (Bulan)		12	19,800,000	12	20,790,000	12	26,350,000	12	24,350,000	12	24,350,000			115,640,000		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional yang disediakan pemeliharaan dan perizinan (Unit)		13	8,267,500	23	12,200,000	33	12,962,500	33	12,962,500	34	14,000,000			60,392,500		
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Administrasi Keuangan (Bulan)		12	73,500,000	12	95,005,000	12	100,200,000	12	85,085,438	12	89,339,709			443,130,147		
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dan Jenis Peralatan Kerja yang diperbaiki (Unit)		14	2,805,000	31	5,898,500	47	10,921,250	47	10,921,250	47	10,921,250			41,467,250		
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan Alat Tulis Kantor yang disediakan (Jenis)		33	15,901,200	30	19,168,075	34	12,371,975	34	12,371,975	34	12,371,975			72,185,200		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Eksemplar)		21378	73,342,000	37978	138,016,000	37288	136,846,600	21378	84,902,533	21378	89,147,659			522,254,792		

Menurunkan angka kecelakaan dan titik kemacetan	Menurunkan angka kecelakaan dan titik kemacetan	Persentase titik kemacetan yang teratasi	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase pemasangan rambu-rambu																		25
			19	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Cakupan Fasilitas Keselamatan LLAJ pada ruas jalan Kota (l)	20	30	555,880,000	40	726,980,000	50	1,061,246,100	70	4,287,250,000	80	6,015,317,150	12,646,673,250			
				Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (Unit)	Tersedianya rambu-rambu lalu lintas (Unit)		0	-	12	245,000,000	75	131,610,725	100	175,000,000	100	175,000,000	726,610,725			
				Pengadaan Marka jalan	Tersedianya Paku Jalan (Buah)		0	240,880,000	332	481,980,000	0	262,860,725	332	635,250,000	332	635,250,000	2,256,220,725			
					Tersedianya marka jalan (meter)		6584		5945		7000		7500		8000					
					Tersedianya ZOSS (Titik/Lokasi)		0		3		0		2		2					
				Pengadaan pagar pengaman jalan	Tersedianya pagar pengaman jalan (Meter)		124	315,000,000	0	-	0	-	124	424,500,000	124	424,500,000	1,164,000,000			
					Tersedianya Deliniator (l)		0		0		0		150		150					
				Pengadaan Traffic light	Tersedianya Traffic Light (lokasi)		0	-	0	-	1	428,413,925	2	950,000,000	1	475,000,000	1,853,413,925			
				Pengadaan median jalan	Tersedianya median jalan (meter)		0	-	0	-	170	195,860,725	0	-	170	195,860,725	391,721,450			
				Pengadaan cembung tikungan	Tersedianya cembung tikungan (Unit)		0	-	0	-	0	-	5	37,500,000	5	37,500,000	75,000,000			
				Pengadaan Jembatan Penyebrangan Orang	Tersedianya Jembatan Penyebrangan Orang (Unit)		0	-	0	-	0	-	0	-	1	1,500,000,000	1,500,000,000			
				Pengadaan Lampu PJU	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (SPM) (Unit)		0	-	0	-	40	-	40	2,000,000,000	40	2,000,000,000	4,000,000,000			
				Pengadaan ATCS	Tersedianya ATCS (Unit)		0	-	0	-	0	-	0	-	3	600,000,000	600,000,000			
				Pengadaan Public Announcer System	Tersedianya Public Announcer System (Unit)		0	-	0	-	0	-	2	65,000,000	2	65,000,000	130,000,000			
				Pengadaan Pengaman Jalan	Tersedianya Pengaman Jalan (Buah)		0	-	0	-	50	42,500,000	0	-	50	42,500,000	85,000,000			
Terwujudnya sarana angkutan yang aman	Terwujudnya sarana angkutan yang aman	Persentase angkutan yang laik jalan				1.09E+09	90		90		90		90		90					
			17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas (l)	40	103	882,480,500	311	820,871,000	275	1,265,600,000	200	1,354,900,000	100	1,334,901,100	5,658,752,600			

			20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Cakupan jumlah kendaraan yang di uji ()	745	1000		-	1250		-	1500		-	1600		-	1700		-				
				Pengadaan Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Unit)		0		-	0		-	0		-	0		-	1		-	4,120,600,000		4,120,600,000	
	Meningkatnya sarana dan prasarana bidang Perhubungan	Cakupan sarana dan prasarana bidang perhubungan (%)				25	30		-	35		-	45		-	60		-	80		-				
			16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan persentase pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ ()	60	60		-	70	352,650,921	-	100	112,120,725	-	100	637,500,000	-	100	522,500,000	-		1,624,771,646		
				Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Pemeliharaan 1 Unit Alat pengujian (Unit)		0		-	0		-	0		-	0		-	1		-	160,000,000		160,000,000	
				Pemeliharaan prasarana balai pengujian	Terpenuhinya pemeliharaan balai pengujian (Unit)		0		-	0		-	0		-	1	195,000,000	-	1		-	195,000,000		390,000,000	
				Pemeliharaan Traffic light	Terlaksananya Pemeliharaan Traffic Light (Unit)		0		-	4	352,650,921	-	4	112,120,725	-	4	185,000,000	-	4		-	185,000,000		834,771,646	
				Pemeliharaan Rambu-rambu lalu lintas	Terpenuhinya rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas (Unit)		0		-	0		-	0		-	75	57,500,000	-	75		-	57,500,000		115,000,000	
			18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan jumlah terminal dan halte ()	12	12		-	12		-	22		-	32	5,000,000,000	-	42	20,625,000,000	-		25,625,000,000		
				Pembangunan gedung terminal	Tersedianya Lahan/Tanah Gedung Terminal (Lokasi)		0		-	0		-	0		-	3	1,500,000,000	-	3		-	9,000,000,000		10,500,000,000	
				Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Tersedianya halte (Unit)		0		-	0		-	0		-	25	1,250,000,000	-	0		-		1,250,000,000		
				Pembangunan Shelter BRT	Tersedianya Shelter BRT (Unit)		0		-	0		-	0		-	30	2,250,000,000	-	30		-	2,250,000,000		4,500,000,000	

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas (orang)				5	5		5		5		5		5				
			5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya ()	23	5	26,000,000	5	13,940,000	5	44,000,000	5	88,000,000	5	44,000,000		215,940,000	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)		5	26,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-		26,000,000	
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal (Orang)		0	-	3	13,940,000	2	44,000,000	4	88,000,000	4	88,000,000		233,940,000	
	Meningkatnya pembinaan disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur (%)				80	75		75		85		85		90				
			3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur ()	80	90	68,728,500	90	102,125,000	90	48,300,000	90	67,390,000	90	75,775,000		362,318,500	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya (Pasang)		69	68,728,500	84	102,125,000	84	48,300,000	43	24,725,000	43	24,725,000		268,803,500	
				Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaiankerja lapangan yang diadakan (Pasang)		0	-	0	-	0	-	26	17,940,000	26	17,940,000		35,880,000	
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan (Pasang)		0	-	0	-	0	-	43	24,725,000	43	33,110,000		57,835,000	
Peningkatan jumlah sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)				80	70		75		80		85		90				
			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur ()	80	90	204,292,500	90	714,693,100	90	473,670,342	90	873,631,050	90	405,044,334		2,671,331,326	

				Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas yang diadakan (Unit)	0	-	10	395,000,000	0	-	1	450,000,000	1	450,000,000		1,295,000,000					
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Unit)	13	12,400,000	37	56,650,000	2	8,526,250	0	-	0	-		77,576,250					
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung kantor yang diadakan (Unit)	0	-	9	33,850,600	6	61,016,067	6	59,423,325	6	59,423,325		213,713,317					
				Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor yang memadai (Unit)	0	-	0	-	1	75,000,000	0	-	0	-		75,000,000					
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/ berkala (Unit)	3	9,464,000	3	9,464,000	3	1,469,525	3	1,707,725	3	1,469,525		23,574,775					
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ Operasional yang dipelihara rutin/ berkala (Unit)	23	182,428,500	23	219,728,500	33	327,658,500	34	350,000,000	34	350,000,000		1,429,815,500					
				Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan (Unit)	0	-	0	-	0	-	12	12,500,000	0	12,500,000		25,000,000					
TOTAL									2,164,363,470				3,554,106,296			3,886,568,492		13,731,337,346		30,741,932,857		54,078,308,461